

PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA RIAN DAN DESA KAPUAK

Hendry Hermawan¹, Entang Adhy Muhtar², Milwan³

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

Hendryhermawan020287@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study is to describe and analyze the implementation of the Policy for the Management of General Administration of Village Administration in Rian Village and Kapuak Village, Muruk Rian District, Tana Tidung Regency, describe and analyze the supporting factors and inhibiting factors for implementing the general administration management policy of the village government in Rian Village and Kapuak Village, Muruk District. Rian, Tana Tidung Regency. The theory used in the research is Charles O. Jones' theory of policy implementation including Organizational Activities, Interpretation, and Applications.

This type of research is qualitative. The informants were the Sub-district head of Muruk Rian, the village head and village staff from Rian and Kapuak villages. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation/field notes. Data analysis techniques are data collection, data reduction (simplification of data), data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study were the implementation of the general administration management policy of village government in Rian and Kapuak villages from the aspect of organizational activities that had not run optimally due to the uneven distribution of tasks and not accompanied by clear technical instructions for the staff of Rian and Kapuak villages. From the aspect of interpretation activities, the understanding of village staff in managing general administration is still lacking, village staff compliance has not gone well, awareness of village staff in managing general administration is good, responsibility and loyalty are not maximized. From the aspect of application/application, Rian and Kapuak villages already have SOPs. Meanwhile, the accuracy and orderliness of the cooperation has not been going well. Supporting factors and inhibiting factors for implementing village government general administration management policies in Rian and Kapuak Villages are (1) supporting factors: (a) training from the sub-district, (b) the role of village heads as motivators, (c) presence of village funds, (d) the existence of facilities and infrastructure (2) The inhibiting factors are (a) the capacity of the village apparatus is still limited, (b) the number of village apparatus is still lacking, (c) the responsibility of the village apparatus is lacking. Recommendations are the need to increase human resources in quality and quantity, periodic coaching and need to apply discipline.

Keywords: Policy implementation, Village General Administration, Village Government

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan Desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Charles O. Jones implementasi kebijakan mencakup Aktivitas Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan.

Jenis penelitian yaitu kualitatif. Informan yaitu Camat Muruk Rian, Kepala Desa dan staf desa Rian dan Desa Kapuak. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Observasi, dan dokumentasi/Catatan Lapangan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak dari aspek aktivitas organisasi belum berjalan dengan maksimal disebabkan pembagian tugas tidak merata dan tidak disertai dengan petunjuk teknis yang jelas pada staf desa Rian dan Desa Kapuak. Dari aspek aktivitas interpretasi yaitu pemahaman staf desa mengelola administrasi umum masih kurang, kepatuhan staf desa belum berjalan dengan baik, kesadaran staf desa mengurus administrasi umum sudah baik, tanggung jawab dan loyalitas belum maksimal. Dari aspek Aplikasi/Penerapan, desa Rian dan Desa Kapuak sudah memiliki SOP. Sedangkan ketelitian dan ketertiban kerjasama belum berjalan dengan baik. Faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak yaitu (1) faktor pendukung: (a) adanya pelatihan dari kecamatan, (b) peran kepala desa sebagai motivator, (c) adanya dana desa, (d) adanya sarana dan prasarana. (2) Faktor penghambat yaitu (a) Kemampuan aparatur desa masih terbatas, (b) jumlah aparatur desa yang masih kurang, (c) tanggung jawab aparatur desa kurang. Rekomendasi yaitu perlu peningkatan SDM secara kualitas dan kuantitas, pembinaan berkala dan perlu penerapan disiplin.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, Administrasi Umum Desa, Pemerintah Desa*

Pendahuluan

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia Cina dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintah. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara. Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pelayanan ini dapat diartikan sebagai penyelenggaraan ataupun proses kegiatan (Nasikhah, 2019).

Administrasi tersebut merupakan suatu usaha terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan suatu perubahan pembangunan yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan harapan bangsa. Administrasi tersebut tidak bisa dipisahkan dari perumusan dan penetapan kebijakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 pada Bab IV Pasal 4 secara teknis menjelaskan

akan pentingnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik dan tertib yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat administrasi pemerintahan desa tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa maka penataan dan pengelolaan administrasi desa sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi aparat pemerintah desa khususnya data yang termuat dalam buku registrasi administrasi desa. Untuk dapat memberikan data dan hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka diperlukan adanya kemauan dan kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan dan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya finansial serta dukungan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang ada di desa.

Kerangka Teori

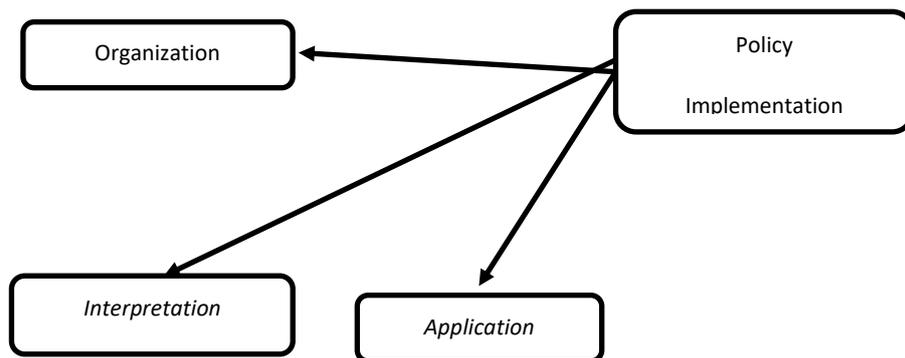
Menurut The Lian Gie (2009: 6) Adminitrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur yaitu:

1. Pengorganisasian, merupakan wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Manajemen, merupakan proses penggerakan orang-orang dan pengerahan segenap fasilitas didalam usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Komunikasi, yaitu proses penyampaian warta dari seorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama manusia.
4. Kepegawaian, merupakan suatu proses yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja di dalam suatu usaha kerja sama.
5. Keuangan, merupakan unsur administrasi yang menyangkut tentang masalah pembiayaan dalam suatu kerjasama, yaitu yang berkenaan dengan penataan, pengelolaan yang melimputi biaya, cara mengelolah serta mempertanggung jawabkannya.
6. Perbekalan, merupakan aktifitas yang menyangkut tentang peralatan yang di butuhkan dalam suatu usaha kerjasama yang melimputi proses pengadaan, penyimpanan, sampai kepada penyingkiran barang barang yang sudah di pergunakan lagi.
7. Tata usaha, kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan usaha kerjasama, yang melimputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, bahan keterangan.
8. Hubungan masyarakat, merupakan kegiatan usaha kerjasama dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atau dengan pihak lain agar mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela.

Untuk mewujudkan tertib administrasi, perlu adanya implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Meter dan Horn (1975) proses implementasi kebijakan sebagai *"Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision"*. Meter dan Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Adapun teori implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Jones tersebut dapat di ilustrasikan pada gambar berikut ini :

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones



Sumber Charles O. Jones (1984)

Dari Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan publik tersebut ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas Organisasi (Organization) atau pelaksanaan kebijakan yang mencakup pembentukan atau penataan sumber daya serta sistem pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh suatu organisasi. Aktivitas organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai permasalahan sehingga pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada badan atau institusi pelaksana.

2. Aktivitas Interpretasi (Interpretation) yaitu pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program kegiatan menjadi rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh organisasi. Interpretasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembuat kebijakan dan mengetahui apa dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat kebijakan dan harus diwujudkan atau realisasikan. Menurut Jones untuk mengimplementasikan kebijakan harus dilakukan dengan standar atau patokan yang jelas serta mengembangkan sarana yang ada untuk menerapkan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tergantung pada sejumlah keadaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya.
3. Aktivitas Aplikasi/Penerapan (Application) Aplikasi yang dimaksud adalah penerapan secara rutin segala keputusan dan peraturan yang ditentukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Penerapan seringkali merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh standar ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kebijakan para pelaksana diarahkan pada standar operasional atau pedoman yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Standar atau pedoman yang dimaksud harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya aspek efektivitas, efisiensi dan objektivitas kebijakan. Selain itu dalam aplikasi kebijakan, pelaksana kebijakan juga dituntut untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan implementasi kebijakan dengan memperhatikan aspek politis yang selalu melibatkan kepentingan publik.

Implementasi kebijakan dalam pengelolaan administrasi umum pemerintah desa akan berdampak kepada efektivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi kebijakan dapat menjadi landasan dan parameter bagi penyelenggara pemerintah desa untuk mewujudkan tertib administrasi. Dari hasil pengamatan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Administrasi umum pemerintahan desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung mengalami permasalahan berupa keterbatasan kemampuan aparat pemerintahan desa itu sendiri baik dari segi sumber daya manusia, pengaruh budaya dan kedisiplinan aparat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa Desa Rian merupakan desa yang pelaksanaan Administrasinya sangat baik dengan nilai 95,5 sedangkan Desa Kapuak dan Desa Rian Rayo berada pada angka yang cukup rendah dimana Desa Kapuak berada pada nilai 43 dan Desa Rian Rayo 46,5 dalam pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa buku register administrasi desa yang belum di isi secara lengkap dan benar sesuai dengan format dalam lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Implementasi pengelolaan administrasi umum di desa Rian dan Desa Kapuak disebabkan karena manajemen organisasi Pemerintahan Desa yang belum maksimal hal ini di lihat dari belum adanya pembagian tugas yang

merata bagi staf desa dan penunjukan tugas bagi staf desa yang khusus menangani dan mengelola administrasi umum Pemerintahan Desa, sehingga kejelasan pembagian tugas atau wewenang aparat desa dalam pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa, selain itu belum Kapasitas SDM aparat desa juga belum maksimal dan kesesuaian antara jumlah personil/staf desa dengan beban kerja masih kurang dan terbatas untuk mmengurus administrasi umum tersebut. Pemahaman aparat desa dalam mengelola administrasi umum pemerintahan desa dilihat dari banyaknya buku register yang masih kosong dan belum diisi hal ini disebabkan pemahaman aparat desa akan pentingnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang. Tanggungjawab dan kesadaran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikasi bahwa aparat desa belum memahami tata cara pengisian buku administrasi desa tersebut, disamping belum adanya pembagian tugas yang jelas oleh kepala desa dalam mengelola adminitrsasi tersebut, aparat desa juga belum memahami seberapa besar manfaat dari buku administrasi tersebut sehingga tidak menjadi fokus utama bagi aparat desa dalam melaksanakan administrasi di desa.

Demikian pendapat Hamdi (2014:105) keberhasilan suatu implementasi kebijakan berkaitan dengan: 1) substansi kebijakan yaitu berkenaan dengan konsistensi isi kebijakan atau spesifikasi kebijakan dilihat dari keselarasan isi kebijakan dengan kebijakan lainnya, 2) perilaku tugas pelaksana yang terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan motivasi kerja, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran, 3) interaksi jejaring kerja yaitu berkaitan dengan kerja sama antarpelaksana dan hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan, 4) partisipasi kelompok sasaran menyangkut tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada dan 5) Ketersediaan sumber daya terdiri atas kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi.

Dari pendapat tersebut sangat jelas bahwa untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerinta desa Rian dan desa Kapuak dengan baik, harus didukung dengan motivasi kerja, interaksi yang baik, partisipasi dan kerja tim yang solit, serta adanya sumber daya yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian memilih Kecamatan Muruk Rian khususnya di Desa Kapuak yang pelaksanaan Administrasinya belum maksimal dan Desa Rian sebagai desa Pembanding yang implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Desanya sangat baik. Kedua desa tersebut dianggap dapat mewakili Pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung, selain itu desa Rian merupakan Ibu Kota Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung

sedangkan desa Kapuak merupakan hasil pemekaran dari desa Rian Kecamatan Muruk Rian.

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan Desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung.

Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Menurut Irawan (2000: 76) desain Penelitian atau rancangan penelitian adalah “*Blue Print*” (cetak biru) penelitian yang dilakukan seorang peneliti sebelum melakukan Penelitian. Desain penelitian memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan yang diselidiki.

b. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive dan Snowball, teknik Purposive adalah teknik penentuan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang telah ditetapkan oleh peneliti itu sendiri (Moleong 2007 : 224). Penentuan informan berdasarkan teknik purposive yang terdiri dari para pejabat yang ada di Kecamatan Muruk Rian yaitu Camat Muruk Rian dan Kepala seksi Pemerintahan, Kepala Desa Rian dan Kepala Desa Kapuak, Sekertaris Desa Rian dan Desa Kapuak Staf desa Rian dan Desa Kapuak

c. Prosedur Pengumpulan Data

Pasalong (2012: 164) menjelaskan bahwa dalam penelitian Kualitatif “Penelitinya adalah instrumen penelitian (key Instrument). Maka dalam penelitian ini peneliti sendiri yang akan menjadi instrumen penelitian sebagai kunci dengan melakukan wawancara secara mendalam serta pengamatan langsung di lapangan. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumen.

d. Metode Analisis Data

Miles and Huberman dalam Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (2009: 246) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu: pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa di Desa Rian dan Desa Kapuak

Pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di desa rian dan desa kapuak merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan harapan untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di desa Rian Dan Desa Kapuak merupakan suatu kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Rian dan Desa Kapuak dalam penyelenggaraan tertib administrasi, kepala desa bertanggung jawab mengorganisasikan, memantau dan mengevaluasi kinerja staf desa dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan.

Implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan desa Kapuak dapat ditinjau dari 3 aspek yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1984 : 166) bahwa implementasi Kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan suatu program dengan memperhatikan Aktivitas Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/ Penerapan. Adapun implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan desa Kapuak sebagai berikut:

a. Aktivitas Organisasi

Untuk mewujudkan tertib administrasi umum pemerintahan desa di desa Rian dan Desa Kapuak, organisasi pemerintahan desa harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala desa sebagai pemimpin dalam struktur organisasi pemerintahan desa harus mampu mengorganisasikan kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas atau wewenang, kapasitas sumberdaya manusia aparat dan dukungan fasilitas. Implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan desa Kapuak sudah berjalan namun belum maksimal. Sembilan buku register dalam administrasi umum yang dijalankan oleh pemerintah desa Rian dan Desa Kapuak terdapat perbandingan dalam implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum dilaksanakan. Dimana pemerintah desa Rian mampu melaksanakan 7 buku register diantaranya, Buku Data Peraturan Desa, Buku data keputusan kepala desa, Buku aparat Pemerintah Desa, Buku tanah kas desa, Buku tanah di desa, Buku agenda, dan Buku Ekspedisi. Sedangkan pemerintah desa Kapuak melaksanakan, Buku Data Peraturan Desa, Buku data keputusan kepala desa , Buku aparat Pemerintah Desa, Buku agenda, Buku Ekspedisi, dan Buku lembaran desa dan buku berita desa. Dari perbandingan implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa yang dilaksanakan di desa Rian dan Desa Kapuak dapat dipengaruhi dari aktivitas organisasi. Dimana desa Rian merupakan desa yang sudah lama terbentuk

sedangkan desa Kapuak adalah desa yang baru terbentuk. Desa Rian yang sudah lama terbentuk dapat mengorganisasikan sumber daya yang ada di kantor desa, mampu bekerja sama, kelengkapan data yang diisi pada buku register dan didukung dengan fasilitas yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Nelli Fitri Khumaidi (2020) mendapatkan hasil yang sama bahwa pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat Desa Tamangede belum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing perangkat desa. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Tamangede ditinjau dari pencatatan data secara manual belum berjalan dengan baik pada pengisian buku register desa. Pembinaan mengenai administrasi desa dilaksanakan setahun sekali oleh pihak kecamatan dan pihak kabupaten secara bergantian, sedangkan pengawasan pelaksanaan administrasi dilakukan oleh pihak kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa.

Struktur organisasi di desa Rian dan Desa Kapuak pada umumnya sudah terbentuk akan tetapi pembagian tugas untuk mengelola administrasi umum belum berjalan dengan baik. Tentu hal tersebut akan berdampak kepada efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti yang disampaikan oleh Jones (1984: 176) bahwa aktivitas organisasi adalah organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Setiap organisasi memerlukan birokrasi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi aktor pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tujuan dari organisasi tersebut menjalankan program-program yang telah dirancang dalam kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dari aktivitas organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan administrasi umum di desa Rian dan Desa Kapuak belum sesuai dengan teori tersebut. Sehingga berdampak kepada capaian kinerja organisasi dalam pengelolaan administrasi umum pemerintah desa.

b. Interpretasi

Berdasarkan pendapat Charles O. Jones (1984 : 166) bahwa implementasi Kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan suatu program dengan memperhatikan aspek interpretasi yang mencakup aspek kepatuhan, kesadaran, tanggung jawab, loyalitas aparat dalam pelaksana kebijakan agar program kegiatan menjadi rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh organisasi. interpretasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembuat kebijakan dan mengetahui apa dan bagaimana tujuan yang hendak di capai oleh pembuat kebijakn dan harus diwujudkan atau realisasikan. Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum

pemerintahan desa di Desa Rian dan desa Kapuak dari aspek kepatuhan, kesadaran, tanggung jawab, loyalitas aparat dalam pelaksana kebijakan masih tergolong renda. Hal itu dapat dilihat dari hasil Peneliti yang diperoleh bahwa penerapan 9 buku register yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rian dan Desa Kapuak belum dapat berjalan dengan maksimal. Dimana pelaksanaan Buku inventaris dan kekayaan desa Dan Buku lembaran desa dan buku berita desa di desa Rian belum berjalan dengan baik. Hali itu disebabkan karena kesibukan dan dari staf desa Rian, kepatuhan terhadap tugas yang diberikan, kesadaran dalam menjalankan tugas, dan kurangnya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan.

Hasil Penelitian ini diperkuat dengan pernyataan Edwards III (1980) yang mengatakan bahwa masalah utama dalam penyelenggaraan administrasi publik adalah persoalan implementasi kebijakan dimana Suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dimungkinkan akan mengalami kegagalan jika kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan karena tanpa implementasi kebijakan yang efektif maka keputusan dan tujuan pembuat tidak akan berhasil. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila proses implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan Kebijakan tersebut sehingga perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang yang benar-benar mampu melaksanakannya.

Pernyataan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa interprestasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di desa Kapuak sejauh ini belum dapat berjalan dengan baik, dimana ada tiga buku yang belum dilaksanakan dengan maksimal, diantaranya yaitu Buku inventaris dan kekayaan desa, Buku tanah kas desa, dan Buku tanah di desa. Buku register yang belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan disebabkan karena kesadaran dan tanggung jawab dari staf desa Kapuak yang kurang. Untuk mewujudkan tertib administrasi serta mampu dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintah desa, staf desa Rian dan Desa Kapuak harus patuh, memiliki kesadaran, bertanggung jawab, dan loyal terhadap tugas yang diberikan.

c. Aplikasi/Penerapan

Aplikasi yang dimaksud adalah penerapan secara rutin segala keputusan dan peraturan yang di tentukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Penerapan seringkali merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahakan oleh stadar ketentuan yang berlaku. Dalam Penelitian ini aktivitas Aplikasi akan di teliti lebih lanjut dari aspek kesesuaian SOP, ketelitian dan

ketertiban dalam pengisian buku register administrasi desa, kerjasama antar aparat desa dan capaian hasil kerja dalam penyelenggaraan administrasi desa. Kerja sama merupakan halterpenting dalam penerapan tertib adminiistrasi, sepertiyang disampaikan oleh Siagian (2000) mendefinisikan istilah Administrasi yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Aplikasi/Penerapan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di desa Rian dan desa Kapuak belum terpenuhi. Walaupun buku register administrasi umum yang disediakan sudah dilengkapi dengan format dan form pengisian namun masih ada buku register yang belum dijalankan. Kenyataan yang didapat di lapangan bahwa, staf desa Rian dan Desa Kapuak belum menggunakan aplikasi/Penerapan sebagai SOP dengan maksimal, terbukti bahwa ada beberapa buku yang belum dikerjakan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Implementasi kebijakan pengelolaan adiministrasi umum di desa Rian dan Desa Kapuak sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

No	Nama Buku Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa			
		Desa Rian		Desa Kapuak	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
	Buku administrasi Umum :				
1	Buku Data Peraturan Desa	Ya		Ya	
2	Buku data keputusan kepala desa	Ya		Ya	
3	Buku inventaris dan kekayaan desa		Tidak		Tidak
4	Buku aparat Pemerintah Desa	Ya		Ya	
5	Buku tanah kas desa	ya			Tidak
6	Buku tanah di desa	Ya			Tidak
7	Buku agenda	Ya		Ya	
8	Buku Ekspedisi	Ya		Ya	
9	Buku lembaran desa dan buku berita desa		Tidak	Ya	
Jumlah :		7	2	6	3

Sumber Data diolah 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat perbandingan implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum di desa Rian dan di desa Kapuak. Implementasi administrasi umum yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa di desa Rian berjumlah dua buku register yaitu Buku inventaris dan kekayaan desa dan Buku lembaran desa dan buku berita desa. Sedangkan implementasi administrasi umum yang belum terlaksana dengan baik di desa Kapuak berjumlah tiga buku register yaitu Buku inventaris dan kekayaan desa, Buku tanah kas desa, dan Buku tanah di desa. Terdapat perbandingan atau perbedaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Rian dan Desa Kapuak. Perbandingan dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi umum di kedua desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung disebabkan karena kurangnya pemahaman, ketelitian, ketertiban dan kerja sama staf desa dalam mengisi buku tersebut sehingga berdampak kepada hasil dan capaian dalam pengelolaan administrasi. Ketelitian, ketertiban pengelolaan administrasi umum pemerintah desa Rian dan Desa Kapuak belum terwujud dengan baik. Staf desa masih mengabaikan beberapa buku register sehingga sampai sekarang buku tersebut tidak terisi dengan baik. Staf desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi umum tersebut karena data yang akan diinput tidak tersedia. Keterbatasan data berupa inventaris dan kekayaan desa pada desa Rian dan desa Kapuak disebabkan karena staf desa belum melakukan inventaris dengan fokus dan belum melaksanakan kerja sama dengan staf desa lainnya untuk melakukan inventarisasi.

Hasil Penelitian yang diperoleh sama dengan hasil penelitian yang Ryan Indra dalam Penelitiannya dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi” Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya buku register yang tidak diisi oleh aparat desa selain itu ada beberapa buku register administrasi desa yang belum dilengkap. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman, ketelitian serta kerja sama aparat mengurus Buku registrasi administrasi desa tersebut sehingga banyak aparat desa yang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik terutama dalam hal tertib administrasi desa sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2016.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa Di Desa Rian Dan Desa Kapuak

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Pemerintah desa Rian dan desa Kapuak sudah mengimplementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa namun belum maksimal. Desa tersebut tetap berupaya untuk menerapkan administrasi umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa Rian dan Kapuak berusaha agar aparatur desa memiliki kemampuan dan memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dari aspek kemampuan, dapat dikatakan aparatur desa masih kurang, namun dengan adanya pelatihan maupun bimbingan teknis pelaksanaan administrasi desa yang dilaksanakan baik lewat kecamatan maupun bekerjasama dengan kantor PMD. Pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf desa Rian dan Desa Kapuak dalam mengurus administrasi desa. Kegiatan tersebut merupakan faktor pendukung dalam menerapkan kebijakan pengelolaan administrasi umum. Selain pelatihan sebagai faktor pendukung, kesiapan dana desa dan sarana prasarana kantor desa. Dana merupakan sumber daya yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, dana desa adalah salah satu faktor pendukung dalam mengurus administrasi di desa Rian dan Desa Kapuak. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang digunakan oleh staf desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa Rian dan Kapuak. Kepala Desa Rian dan Kapuak sebagai kepala pemerintahan sudah memfasilitasi sarana dan prasarana di kantor desa dengan baik sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Didukung dengan pendapat Mahayana (2013: 8) menyatakan peran Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa berjalan baik. Kepala desa Rian dan Kepala desa Kapuak sudah memfasilitasi aparatur desa dengan baik sehingga dapat membantu aparat desa dalam mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Faktor Penghambat

Faktor kemampuan dan keterampilan aparatur desa pada bidang tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa faktor ini kurang dimiliki oleh aparat/perangkat Desa Rian dan Desa Kapuak sehingga berdampak kepada efektivitas dalam administrasi. Dari aspek kemampuan aparatur desa masih tergolong rendah, hal itu disebabkan karena latar belakang pendidikan yang masih tergolong rendah.

Kurangnya pemahaman aparatur desa Rian dan Desa Kapuak sehingga berdampak kepada implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum. Dimana ada beberapa buku yang belum diisi oleh staf desa Rian ataupun

Desa Kapuak karena belum mengerti bagaimana mengisi data tersebut terutama yang belum ada data pendukungnya di desa. Misalnya ukuran luas tana Desa belum dilakukan pengukuran luas tana desa karena tana milik desa tersebut terlalu luas. Sehingga untuk buku register tersebut tidak dilakukan pengisiannya.

Hasil Penelitian tersebut didukung dengan pendapat Edwards III (1980) bahwa sumberdaya (resources), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas akurat dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan yaitu staff yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Faktor sumberdaya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat yang dimiliki, melainkan mencakup seluruh kemampuan sumber daya manusia.

Pengisian buku register di Desa Rian dan Desa Kapuak belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kapasitas SDM yang terbatas dan pembagian tugas yang belum merata serta data pendukung dalam pengisian buku register administrasi tersebut belum ada. Di desa Rian data pendukung yang belum ada yaitu Buku inventaris dan kekayaan desa, dan Buku lembaran desa dan buku berita desa. Sedangkan di desa Kapuak data yang belum ada untuk diisi pada buku register yaitu Buku inventaris dan kekayaan desa, Buku tanah kas desa, dan Buku tanah di desa.

Pembagian tugas yang tidak merata serta jumlah aparatur desa yang terbatas menjadi fktor penghambat. Jumlah aparatur pemerintahan di desa Rian dan Desa Kapuak masih tergolong kurang sehingga berdampak pada tugas dan fungsi yang dikerjakan. Jumlah aparatur desa yang kurang mengakibatkan tugas dan fungsi merangkap dan tentu berdampak kepada tidak efektivitas dalam mengurus administrasi.

Demikian pendapat Meter dan Horn (1975:463) tentang SDM dalam mengimplementasi kebijakan yaitu salah satu variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia, salah satunya adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Berkait dengan pendapat tersebut, sumber daya manusia di desa Rian dan desa Kapuak harus menjadi perhatian bagi kepala desa selaku kepala pemerintahan dalam hal manajemen sumber daya manusia. Sumber daya yang memadai dan memiliki kemampuan tentunya akan berdampak kepada kinerja dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tertib administrasi umum pemerintah desa, maka perlua adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di akntor desa. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Selain kemampuan staf desa yang terbatas, tanggung jawab staf desa dalam menjalankan tugas khususnya dalam pengisian buku register administrasi desa masih kurang. Sampai saat ini belum ada staf desa yang khusus menganangi dan diberi tanggung jawab khusus untuk mengerjakan

pengisian buku register administrasi desa tersebut karena sampai saat ini masih ditangani oleh masing-masing kasi dan kaur di desa. Tanggung jawab yang kurang dalam mengurus administrasi umum di desa menjadi faktor penghambat karena aparat desa tidak patuh dalam melaksanakan tugas, dan kesadaran aparat desa melaksanakan tugas juga berkurang. Untuk mewujudkan tertib administrasi di desa tentu sangat didukung dengan motivasi dan rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan. Tanggung jawab yang diberikan kepala desa kepada staf merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya bahwa staf desa Rian dan desa Kapuak dapat dikatakan kurang bertanggung jawab atas tugas yang sudah dibagikan sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Staf desa mengabaikan tugas yang diberikan disebabkan karena kesibukan di luar dari tugas yang diberikan, sehingga tugas kantor yang seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan dengan baik.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak dari aspek aktivitas organisasi belum berjalan dengan maksimal disebabkan pembagian tugas tidak merata dan tidak disertai dengan juknis yang jelas pada staf desa Rian dan Desa Kapuak. Dari aspek aktivitas interprestasi yaitu pemahaman staf desa mengelola administasi umum masih kurang, kepatuhan staf desa belum berjalan dengan baik, kesadaran staf desa mengurus administrasi umum sudah baik, tanggung jawab dan loyalitas belum maksimal. Dari aspek Aplikasi/Penerapan, desa Rian dan Desa Kapuak sudah memiliki SOP dengan format dan form pengisian buku register, tetapi staf desa Rian dan Desa Kapuak belum menggunakan aplikasi/Penerapan sebagai SOP dengan maksimal.
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak yaitu (1) faktor pendukung: (a) adanya kegiatan pelatihan dari kecamatan, (b) peran kepala desa sebagai motivator, (c) didukung dengan adanya dana desa, (d) adanya sarana dan prasarana yang memadai. (2) Faktor penghambat yaitu (a) Kemampuan aparatur desa masih terbatas, (b) jumlah aparatur desa terbatas dalam pengelolaan administrasi umum, (c) tanggung jawab aparatur desa kurang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan administrasi umum lebih lanjut:

1. Saran teoritis
 - a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa dengan menggunakan teori yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda.
 - b. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian tentang aktualisasi implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa.
 - c. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan hasil penelitian ini dengan bijak tanpa plagiasi.

2. Saran praktis
 - a. Bagi pemerintah Desa Rian dan pemerintah Desa Kapuak diharapkan membentuk kepengurusan dan membagi tugas secara merata bagi staf desa dalam pengelolaan administrasi umum pemerintah desa sehingga staf desa dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan.
 - b. Disarankan bagi pemerintah desa dan pemerintah desa Kapuak perlu untuk menambakan staf desa secara kuantitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di desa.
 - c. Disarankan perlu adakan peningkatan kemampuan dalam mengelola administrasi umum di desa Rian dan desa Kapuak melalui pelatihan, pembinaan berkala.
 - d. Perlu bagi pemerintah desa Rian dan Desa Kapuak menerapkan disiplin yang bertujuan meningkatkan rasa tanggungjawab staf.

Daftar Pustaka

- Edwar III, George C. (1980). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai press Inc.
- Hamdi, Muclis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Irawan, Prasetya. (2000). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Wadsworth, Inc. California.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikhah, M. A. (2019). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2670>.
- Nelli Fitri Khumaidi. (2020). *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Skripsi*. Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Ryan Indra Pratama. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sondang Siagian P. (2000). *Kepemimpinan Organisasi & Prilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Van Meter, D.S dan Van Horn, C.E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa

Tabel 1 Data Pelaksanaan Administrasi Desa di Kecamatan Muruk Rian

No	Desa	Rian	Kapuak	Sapari	Rian Rayo	Seputuk	Balayan Ari
1	Administrasi Umum	95.5	43	90	46.5	72.75	76.25
2	Penduduk	100	20	84.5	32	80	36
3	Keuangan	92.2	98.4	98.4	98.4	98.4	92.2
4	Pembangunan	94.75	79	94.75	26.5	100	37
5	Administrasi Pemerintahan desa	95.61	60.1	94.16	50.85	87.78	60.36

Sumber data: Kegiatan Klinik Bina Administrasi Desa Kecamatan Muruk Rian Tahun 2018